BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dari negara lain yang kini sedang berusaha untuk mengoptimalkan dalam segala hal, terutama kemampuannya di bidang ekonomi. Pengoptimalan ini untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan optimalisasi ini tidak lepas dari bidang perindustrian, perdagangan serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan rakyat. Suatu kebijakan keuangan sangat diperlukan oleh pemerintah untuk menunjang pencapaian keberhasilan yang diinginkan. Salah satu yang membantu dalam kebijakan keuangan untuk pembangunan negara ini adalah bank yang memiliki peran sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang dapat dikatakan efektif serta sebagai penyalur dana untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memajukan perkenomonian di suatu negara. Sektor-sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian ini seperti, bidang perdagangan, industri serta pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui tangan perbankan. Semua sektor yang dibangun dalam hal ini untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum usaha perbankan meliputi bidang pelayanan jasa (*service*) dan kredit atau pinjaman (*loan*), dimana secara jelas tertuang dalam Pasal 6 undang-undang No. 10 Tahun 1998. Setiap bank memiliki jenis dan bentuk usaha (produk) yang sama, tetapi adanya perbedaan dalam karakteristik produk yang dimiliki masing-masing bank tergantung pada sasaran yang ingin

1

dicapainya. Proses globalisasi ekonomi yang kini sedang terjadi, memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha di segala bidang terutama pada bidang perdagangan, industri dan jasa yang sampai saat ini belum merata pada wilayah Indonesia. Hal utama yang membuat kurang efektifitas dalam menjalankan perekonomian merata yaitu disebabkan fasilitas dan pemerataan infrastruktur pada wilayah tertentu untuk menjalankan kelancaran bisnis pengusaha-pengusaha yang ada pada negara ini. Pemerintah melakukan program pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan kerjasama kepada pengusaha-pengusaha kontraktor dengan jaminan yang diberikan untuk memberikan kepercayaan bahwa proyek akan selesai dengan adanya bukti diatas kertas yang menjamin kepercayaan tersebut bahwa akan selesai sesuai kesepakatan, yang digunakan adalah jasa perbankan dalam bentuk Bank Garansi.

Salah satu kegiatan usaha atau produk bank yang memiliki manfaat untuk para pengusaha yaitu bank garansi. Bank garansi yaitu pernyataan secara tertulis dari bank yang berisi kesepakatan serta kesanggupan dari dua belah pihak untuk menjamin pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain (penerima jaminan), apabila nasabah (pihak yang dijamin) melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan (perjanjian pokok). Bank garansi dalam jaminan untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek dapat disebut performance bond of bank guarantee, memiliki peranan untuk jaminan yang diberikan dalam pembuatan pembangunan infrastruktur di negara ini.

Pada Musyawarah Peresmian Pembukaan Nasional (MUSRENBANGNAS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2020-2024, Bpk Presiden Jokowi mengatakan bahwa "pertama kita akan terus lanjutkan pembangunan infrastruktur, karena kita akan memperkokoh fondasi dalam berkompetisi dengan negara-negara lain." Di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Lalu dilanjutkan dengan mengatakan "Tetapi apa sih yang harus kita lakukan ke depan? Kita akan menyambung infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan produksi pertanian, ke kawasan-kawasan produksi perikanan, pada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi, di setiap daerah." Ujarnya.

Sedangkan pada konferensi pers acara Indonesia Investment Forum 2018 di Hotel Conrad, Tanjung Benoa. Bpk Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan "Salah studi menujukkan pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 6,5 persen, tentunya dengan reform yang lain." Lalu beliau menyebutkan "manfaat lainnya, memperluas kesempatan bagi investor domestik maupun internasional untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infra dengan berbagai macam instrumennya. Bisa dibeli oleh masyarakat dan tidak hanya pembiayaan dari perbankan saja yang meningkat tetapi dari ritelpun dapat meningkat." Ujarnya.

Berikut adalah data anggaran yang diberikan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan tujuan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi di Indenesia pada era Jokowi di tahun 2015-2019.



Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 1.1 Grafik anggaran infrastruktur pemerintah

4

Jika dapat dilihat adanya pergerakan melaju dalam anggaran dana infrastruktur pemerintah 10 tahun terakhir. Hal ini menandakan adanya pergerakan untuk pemerataan infrastruktur pada wilayah-wilayah di Indonesia, agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Sangat penting peran perbankan dalam menunjang pembangunan infrastuktur ini terutama pada jasa pelayanan perbankan untuk penerbitan *performance*

bond pada suatu pekerjaan atau proyek.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyusun tugas akhir dengan judul "Performance Bond Sebagai Jaminan Pelaksanaan Proyek"

I.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini, adalah:

1. Memahami tentang penggunaan Performance Bond

2. Mengetahui proses penerbitan *Performance Bond*

3. Mengetahui Kendala dalam penerbitan Performance Bond

I.3 Manfaat

Penulis berharap agar penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain :

a. Manfaat Teoritis pada Tugas Akhir:

Bagi Pembaca, dapat digunakan sebagai referensi serta menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis maupun praktis mengenai garansi bank khususnya tentang *performance bond*.

b. Manfaat Praktis pada Tugas Akhir:

1.Bagi Perbankan, dapat digunakan untuk memotivasi dalam peningkatan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan yang terbaik khususnya pada Garansi Bank.

2. Bagi Pemerintah atau Regulator, dapat digunakan sebagai bahan referensi jaminan yang digunakan pada pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk memilih dengan tepat jenis Bank Garansi yang sesuai dengan kebutuhannya.